

# Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Objek Wisata Banyuwana Waterfall

Ni Made Rosita Dewi<sup>1</sup>, Karimah Liana<sup>2</sup>, Ni Putu Wiwin Listya Adnyani<sup>3</sup>, I Gusti Ngurah Desta Permana Putra<sup>4</sup>, I Putu Adi Permana Putra<sup>5\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 01-08-2024  
Revised 11-12-2024  
Accepted 31-12-2024  
Available online 31-12-2024

### Kata Kunci:

Policy Implementation,  
Gender Mainstreaming,  
Tourism Destination,  
Banyuwana Waterfall



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

## ABSTRAK

The management of the Banyuwana Waterfall tourist attraction based on community-based tourism (CBT) has contributed to the local community's income. The massive growth of tourism provides opportunities for men and women to participate in it. This is related to the context of gender equality. Gender issues must be integrated into sustainable development in various sectors, including tourism. This study raises the topic of gender mainstreaming at the Banyuwana Waterfall tourist attraction to assess the performance of policies and gender equality in tourism management. This study aims to understand and analyze the implementation of gender mainstreaming policies at the tourist attraction. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis is carried out through interactive qualitative data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Data validity testing is carried out through data triangulation. The study results indicate that implementing gender mainstreaming at the Banyuwana Waterfall tourist attraction positively contributes to the sustainability of fair and inclusive tourism. However, various challenges exist, especially regarding the implementer's understanding of policy standards and targets. Economic, social, and political factors also influence the implementation of PUG policies, but

gender dominance and bias in tourism development are still significant obstacles. To overcome this, educational efforts, cross-sector collaboration, and integration of gender-responsive policies in tourism development planning are needed to optimize the implementation of gender mainstreaming to achieve sustainable development goals.

## 1. INTRODUCTION

Fenomena kesetaraan gender menjadi isu penting dalam pembangunan. Aspek gender perlu diintegrasikan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan diberbagai sektor. Sesuai dengan poin ke-lima dalam agenda *Sustainable Development Goal's 2023*, pemerintah Indonesia telah merespon upaya mencapai kesetaraan dengan menghadirkan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini diinisiasi agar dapat mengedepankan kesetaraan dan menyediakan ruang akses kepada perempuan diranah publik. Meskipun demikian, hingga kini berbagai permasalahan masih terjadi, termasuk diskriminasi dan ketimpangan yang berbasis gender di tengah Masyarakat (Sudirman & Susilawaty, 2022). Tidak hanya dalam konteks nasional, hal ini juga perlu diintegrasikan dalam upaya pembangunan di daerah. Sesuai dengan (*Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2021*, n.d.) pada Pasal 5B Ayat (2) yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan daerah yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Pariwisata Bali telah mengalami dinamika perkembangan yang beragam, seperti munculnya model pertumbuhan pariwisata dengan menyesuaikan pada kondisi wilayah

\*Corresponding author.  
E-mail: [diegho.permana@gmail.com](mailto:diegho.permana@gmail.com)

dan masyarakat setempat. Hal ini ditandai dengan kemunculan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat dalam pertumbuhan wisata daerah. Konsep pembangunan pariwisata ini dipercaya dapat membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di daerah (Permatasari, 2022). Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali yang dijadikan sektor unggulan, pada intinya juga mengedepankan peran masyarakat di dalamnya. Konteks masyarakat dalam pariwisata tentu tidak lepas dari unsur kesetaraan gender. Hasil penelitian (Wilson & Ypeij, 2012) menunjukkan pembangunan pariwisata dapat menghasilkan perubahan yang besar sehingga menegaskan kembali konstruksi gender yang ada dan menawarkan peluang bagi masyarakat lokal untuk memulai perubahan dan mempertanyakan konstruksi yang ada. Hal ini berarti kaum perempuan juga dapat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan pariwisata.

Perempuan dalam tata kelola pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian (Hapsari & Usman, 2022) menunjukkan peran perempuan dalam mendukung pariwisata di desa wisata dan membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan lainnya di desa tersebut. Selanjutnya penelitian oleh (Subekti, 2009) menyatakan bahwa mayoritas perempuan aktif terlibat pada kegiatan sosial masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal dan kelestarian alam sekitar. Hasil riset lainnya yang dilakukan oleh (Nurti et al., 2023) menjelaskan terkait kinerja gender, perempuan mengalami peningkatan agensi dan secara positif mengubah cara pandang masyarakat luas terhadap perempuan. Sejatinya, pariwisata telah membuka gerbang kesempatan bagi perempuan untuk terlibat di dalam hal-hal yang bersifat kepariwisataan, namun keterlibatan perempuan belum dapat menjamin terwujudnya kesetaraan gender di dalamnya. Mengingat partisipasi perempuan yang luar biasa dalam membangun wisata daerah.

Berkaitan hasil riset (Azmy & Pertiwi, 2021) menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Walikota Bogor No. 42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di pendidikan menengah di Kota Bogor belum optimal. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM di instansi pendidikan yang melaksanakan program PUG, serta kurangnya pemahaman akan perspektif gender yang adil. Hasil riset lainnya yang dilakukan oleh (Wongkar et al., 2019) menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018 belum optimal karena kurangnya dukungan dalam komunikasi dan disposisi. Berdasarkan hasil riset terdahulu, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender telah banyak dilakukan pada sektor pemerintahan dan pendidikan namun hasilnya belum optimal. Hal ini juga perlu ditinjau, dari sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Melalui hal tersebut, kebaruan dari riset ini tidak hanya terletak pada lokus penelitian, tetapi temuan dan lingkup riset akan lebih berkembang sesuai dengan fenomena yang terjadi.

Bercermin pada penjabaran fenomena di atas, riset ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan pariwisata. Mengingat pertumbuhan pariwisata yang sangat massif dan menjadi sektor unggulan daerah. Salah satu situs wisata yang menarik untuk dikaji ialah objek wisata Banyuwana *Waterfall* yang terletak di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan objek wisata ini merupakan wujud dari *Community Based Tourism* (CBT) dan telah berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat setempat (putuekajalanjalan.com, 2018). Keberhasilan pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat yang terjadi pada situs ini menjadi ketertarikan tersendiri untuk dikaji.

Bagaimana realita pengelolaan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mengedepankan unsur kesetaraan gender. Melalui penjabaran tersebut, riset ini terfokus untuk mengkaji Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini memusatkan perhatian pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di objek wisata Banyuwana *Waterfall*. Sehingga penelitian ini di analisis menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan Banyuwana *Waterfall*. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender untuk pembangunan sosial, khususnya dalam konteks pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan guna memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

## **2. METHODS**

Penelitian ini berlokasi pada objek wisata Banyuwana *Waterfall* di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Desain riset yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam. Objek riset mencakup pelaksana kebijakan Pengarusutamaan Gender dan pengelola objek wisata. Teknik penentuan informan menggunakan metode *snowball sampling*, pengambilan sampel yang dimulai dengan sejumlah kecil sumber data, yang secara bertahap berkembang menjadi lebih banyak. Proses ini dilakukan karena sumber data awal belum dapat menyediakan informasi yang memadai, sehingga diperlukan identifikasi sumber data tambahan melalui rekomendasi atau referensi dari sumber yang sudah ada. Dengan cara ini, jumlah sampel semakin bertambah hingga dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan (Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., Nurfikriyah Irhashih Ilyas, S.Pd., 2023). Jumlah informan akhirnya diperoleh sebanyak 14 informan yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng; Kepala Desa Wanagiri; Ketua Pengelola Objek Wisata Banyuwana *Waterfall*; Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng; Ketua BUMDES Wanagiri; Pengelola Wanita di Objek Wisata Banyuwana *Waterfall*; Pengelola Pelajar di Objek Wisata Banyuwana *Waterfall*; Petugas Ojek sekaligus pengelola; Pedagang di Banyuwana *Waterfall*; dan Wisatawan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara non partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif interaktif dengan mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Keabsahan data diuji melalui triangulasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

## **3. RESULTS AND DISCUSSIONS**

### **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender merupakan langkah penting dalam memastikan kesetaraan gender dan keadilan. Melalui integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program, pemerintah dan lembaga dapat menciptakan

lingkungan yang inklusif dan merata bagi seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan Sasaran kebijakan merupakan indikator pertama untuk melihat keberhasilan implementasi pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini karena, pemerintah sebagai seorang implementor kebijakan haruslah mengetahui eksistensi, tujuan, dan juga sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan, ditemukan hasil penelitian mengenai indikator standar dan sasaran kebijakan sebagai berikut:

*“Jadi terkait pengarusutamaan gender di Kabupaten Buleleng kita sudah punya payung hukum namanya perda No 2 Tahun 2021 tentang PUG. Jadi untuk PUG ini setiap tahun kita juga melaksanakan pelatihan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender), tapi baru ruang lingkup SKPD. Rencana kedepan kita sasarannya desa, tapi karena keterbatasan anggaran jadi baru lingkup SKPD baru kami latih”.*  
**(Kadek Dami, SE, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 09.40 WITA)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama informan dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah di tingkat daerah telah menjadi payung hukum yang dijadikan landasan dalam melaksanakan berbagai program guna mengimplementasikan kebijakan PUG. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kebijakan PUG yang berada di tingkat Provinsi.

*“Betul iya kayak gitu, tergantung si kayak misalnyakan tahun kita ada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan PUG itu karena memang sudah diatur dari pusat ada nomenklaturnya jadi pesertanya itu adalah hanya OPD yang ada di pemprov Bali aja tetapi kita juga ada sub kegiatan lain itu namanya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan pada bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, kewenangan provinsi. Nah disitu kita biasanya milih ni mau sub kita ngambil yang hukumnya atau ekonominya, atau sosialnya, atau yang mana kayak gitu. Nah kalo tahun lalu karena menjelang pemilu tahun 2024 kita fokus ke politiknya, kalo tahun ini rencananya kita fokus ke ekonominya, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan yang kewirausahaan yang perspektif gender gitu.”*  
**(Ni Luh Ayu Cahya Saraswati, S.Psi., M.M., Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.05 WITA)**

Dilihat dari respon tersebut, ditemukan bahwa semua bidang belum tersentuh dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Respon yang diberikan oleh Ibu Ni Luh Ayu Cahya mengenai pemahaman poin penting dari kebijakan PUG tidak selaras dengan hasil wawancara dengan informan Kepala Desa Wanagiri dalam memahami mengenai standar dan sasaran kebijakan pengarusutamaan gender.

*“Kalo memang dari pemerintah harus semestinya seperti itu, namun situasi dan kondisi yang tidak kadang yang mungkin berbeda dan tidak mesti ataupun tidak semata-mata harus seimbang, ya mungkin dalam 10 persen laki ya tiap apa 100 persen ya 30 persennya dari kaum wanita, Namun realitanya di segala kegiatan kami pun tidak bisa harus mengikuti arahan tersebut. Jadi tidak terpaku harus 30 persen ataupun 50 persen wanita kan begitu, tidak bisa. karena yang tadi saya sampaikan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan”.*  
**(Made Suparanton SS, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 12.00 WITA)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait standar dan sasaran kebijakan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah termuat dalam dokumen kebijakan PUG akan tetapi belum terealisasi di seluruh organisasi perangkat daerah. Hal tersebut dibuktikan dan



dengan hasil wawancara bersama Ketua Pengelola Objek Wisata Banyuwana Waterfakk sebagai berikut:

*"Belum begitu tahu tentang itu, akan tetapi kalau di lihat di Banyuwana, kita masih ada penyetaraan gender, karena dalam ruang lingkupnya pemerintah memberikan sebuah kebijakan bukan dalam arti untuk kelompok itu sendiri akan tetapi untuk semua masyarakat terlibat baik itu perempuan maupun laki laki jadi semua disamakan/semua punya hak yang sama, itu yang menjadi dasarnya". (Ketut Rinta, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 13.10 WITA)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sasaran dari kebijakan PUG belum menyentuk setiap lini bidang sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap standar dan sasaran kebijakan tersebut. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang turut andil mengelola objek wisata:

*"Ya kesetaraan gender selama ini belum pernah denger saya, ya apa itu?" (Gede Natih, Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 15.19 WITA)*



(Wawancara Bersama Dinas Sosial P3A Provinsi Bali)



(Wawancara Bersama Kepala Desa Wanagiri)

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas mengenai standar dan sasaran kebijakan bahwa sasaran kebijakan telah termuat dalam dokumen kebijakan PUG, akan tetapi belum terealisasi di seluruh organisasi perangkat daerah. Disamping itu, terbatasnya pelaksanaan sosialisasi, pengelola objek wisata dan masyarakat belum paham akan isi standar dan sasaran kebijakan PUG. Karena dalam implementasinya tidak selalu terpaku sepenuhnya dan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan temuan lain dari (Putra, 2023) yang menyebutkan bahwa ketidakefektifan suatu kebijakan dapat tercermin dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan PUG, keterbatasan anggaran yang tersedia, serta dampak pandemi Covid-19 yang turut menghambat pelaksanaannya.

## **2. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan diperlukannya sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dari segi ketersediaan sumber daya, kemampuan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta proses pengelolaan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun sumberdaya sarana prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan mengenai indikator sumber daya sebagai berikut:

*"Kalau kepanitiaan kita sih dikit ya jujur, jadi cuma orang-orang di bidang aja. paling ditambah dibantu-bantu sama adik-adik yang lagi ada PKL atau magang,*

*tapi itu juga ga tertulis. Entah ASN ataupun non-ASN. Paling sekitar 7-8 orang aja, nggak sebanyak kayak kita kepanitiaan di mahasiswa, nggak sebanyak itu. Jadi banyak yang merangkap-merangkap sih biasanya tugasnya". (Ni Luh Ayu Cahya Saraswati, S.Psi., M.M., Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.05 WITA)*

Berdasarkan hasil pelaksanaan wawancara dengan Informan dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali terkait dengan SDM ditemukan bahwa dalam melaksanakan program yang berfokus pada Pengarusutamaan Gender, terdapat keterbatasan jumlah pelaksana program yang terdiri dari 7 hingga 8 orang. Sejalan dengan hal tersebut informan juga menyampaikan bahwa terdapat monev terkait kebijakan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara berikut:

*"Kalo misalnya ketercapaian standar itu mereka kalau dari KEMENPPPAnya itu sendiri, tiap dua tahun sekali mereka melakukan monev. Lumayan kompleks sih kalau mereka monevnya. Ada instrumen monevnya juga, tidak hanya dari KEMENPPPA, tapi juga dari KEMENDAGRI itu ada monevnya". (Ni Luh Ayu Cahya Saraswati, S.Pi., M.M. Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 12.05 WITA)*

Standar kerja dalam implementasi PUG berpedoman pada peraturan pusat yang mencakup instrumen monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh KEMENPPPA dan KEMENDAGRI. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Dinas Sosial P3A Provinsi Bali terkait dengan Sumber Daya dianggap masih kurang karena kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik dari segi SDM maupun anggaran serta tidak adanya pelatihan yang dilakukan ataupun diikuti oleh pihak dinas sendiri. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan dari Dinas Pariwisata sebagai berikut:

*"Kalo dari dinas pariwisata tidak pernah ada kontribusi bantuan dana ke desa wanagiri, karena desa wanagiri merupakan salah satu desa yang masuk salah satu DTW di Buleleng yang sudah bisa memenuhi kebutuhan anggarannya sendiri atau mandiri". (Ni Luh Made Enny Widhiyati, S.STP, MH, Senin, 20 Mei 2024, Pukul 14.00 WITA)*

Melalui penjabaran diatas dapat diindikasikan bahwa pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tidak memberikan bantuan berupa anggaran kepada Desa Wanagiri karena desa tersebut telah dianggap mampu menjadi desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan anggarannya sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Wanagiri sebagai berikut:

*"Terkait dengan anggaran dari pemerintah belum, belum ada bantuan dari dinas-dinas terkait khususnya dinas pariwisata ya belum. cuma yang sudah disampaikan atau diberikan ya pembinaan dan pelatihan-pelatihan pemandu wisata ataupun gaet-gaet lokal kita ya itu si untuk strategi tracking, trekking-trekking lokal gitu berupa untuk dana BELUM". (Made Suparanton SS, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 12.00 WITA)*

Melalui wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa belum terdapat bantuan langsung dari dinas terkait, terutama dari Dinas Pariwisata, namun upaya pembinaan dan pelatihan pemandu wisata serta strategi lokal telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan kondisi SDM di objek wisata Banyuwana *Waterfall* yang diungkapkan oleh informan Ketua BUMDes Wanagiri sebagai berikut:

*“Terkait dengan sumberdaya manusia, dari kelompok air terjun Banyuwana amertha sebenarnya merupakan kelompok yang mempunyai kegiatan berbeda maksudnya awal mulanya terbentuk kelompok tani hutan, akhirnya dibentuklah KSB baru yang khusus mengurus di jasa lingkungan atau wisata nah disana dikelompok Banyuwana amertha ada ketua kelompok pengelola, sekretaris ada, bendahara ada, selain itu disana juga ada namanya seksi-seksi (seksi penataan, seksi konservasi, seksi lingkungan dan lain sebagainya) dari pembagian kerjanya mereka itu sesuai dengan tupoksi kalau ketua ya manage kegiatan-kegiatan yang ada disana, ya membangun komunikasi ke level atasnya saat ini secara organisasi ada kepala desa, saya sebagai ketua BUMDes, kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan dilapangan harus dijalankan sesuai dengan rencana kerja dalam eksekusinya harus ada penyampaian ke kami”.* **(Made Darsana, Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 09.20 WITA)**

Dari hasil wawancara di atas terdapat keterbatasan SDM dan anggaran yang mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan PUG di Dinas itu sendiri. Meskipun pengelolaan di objek wisata telah mampu menunjukkan kemandiriannya, akan tetapi konteks kesetaraan gender masih belum tampak.

Terkait dengan indikator tersebut, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat optimalnya implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas terkait. Meskipun pengelolaan objek wisata telah mampu menunjukkan kemandirian dalam beberapa aspek, penerapan prinsip kesetaraan gender masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan melalui program APBN dinilai masih kurang mendukung pengembangan PUG. Kegiatan yang bertujuan untuk mengarusutamakan gender masih sangat terbatas, dan pendekatan yang digunakan cenderung berbasis proyek, bukan sistemik. Selain itu, kurangnya pemahaman konsep berwawasan gender di kalangan pelaksana lapangan menjadi kendala signifikan dalam penerapan kebijakan ini (Puspitosari & Maharani, 2014). Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi PUG tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan SDM, tetapi juga oleh pendekatan strategis yang digunakan serta tingkat pemahaman gender dari para pelaksana kebijakan.

### **3. Komunikasi**

Indikator komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, dimana komunikasi berperan dalam penyebaran maupun penyampaian informasi terkait kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam wawancara bersama beberapa informan terkait indikator komunikasi dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Waktu ini juga kita pernah melakukan zoom meeting untuk organisasi perempuan. Nah, kita juga punya group WA nih untuk organisasi perempuan, jadi pun kalau misalnya ada informasi apa-apa atau misalnya kita berkegiatan yang mengundang organisasi perempuan, lebih gampang jadinya kita berkomunikasi kayak gitu”.* **(Ni Luh Ayu Cahya Saraswati, S.Psi., M.M., Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.05 WITA)**

Salah satu cara mempermudah komunikasi Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali memiliki grup WA bersama dengan organisasi perempuan. Jika ada informasi, atau kegiatan yang memerlukan organisasi perempuan, grup tersebut akan digunakan untuk berkomunikasi.

Selain itu terdapat komunikasi langsung melalui sosialisasi implementasi PUG yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*"Kalau desa wanagiri kan sudah pernah sosialisasi pasti mereka paham lah tentang gender karena juga perbekelnya ada juga disana setidaknya pernah kalau ngasih pemahaman iya kemasyarakat, Sudah 2 kali kita sosialisasi terkait gendernya". (Ni Nyoman Tri Putrini, S. Km. Senin, 13 Mei 2024, Pukul 09.40 WITA)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, dapat dilihat bahwa penyampaian komunikasi yang dilakukan terkait implementasi kebijakan PUG berupa sosialisasi seperti yang sudah dilakukan di Desa Wanagiri. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di kelompok pengelola objek wisata, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara berikut:

*"Kalau selama ini ndak ya, baru sekarang adik adik yang membuka, jadi sehingga mungkin suatu kebetulan juga dalam pengelolaan ini menyamakan gender antara laki dan perempuan mungkin dari dinas juga enda pernah, artinya belum pernah ada himbauan lah ya, cuman sekarang baru tau gitulah". (Ketut Rinta, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 13.10 WITA)*

Sesuai dengan pernyataan informan Ketua Pengelola Objek Wisata Banyuwana *Waterfall* diatas bahwa informan tidak pernah mendapat himbauan terkait dengan kebijakan PUG dari dinas terkait. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan masyarakat sekaligus pengelola objek wisata sebagai berikut:

*"Kalau sosialisasi kayaknya belum ada, paling dari BUMDES itu baru ada, dari desa, kayaknya kalo dari dinas-dinas itu belum ada terkecuali ya ketua itu ya ada tapi kan dipanggil ke Desa" (Gede Natih, Tukang Ojek, 25 Mei 2024, Pukul 15.19)*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang terbentuk antar aktor yang terlibat mampu memanfaatkan teknologi serta membangun jaringan bersama dengan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, akan tetapi dalam sosialisasi yang dilakukan diperlukan penguatan secara mendalam. Mengenai proses komunikasi yang terbentuk antar aktor yang terlibat mampu memanfaatkan teknologi serta membangun jaringan bersama dengan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, akan tetapi dalam sosialisasi yang dilakukan diperlukan penguatan secara mendalam.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, peran agen pelaksana sangat penting dalam menjamin kesuksesan dan efektivitas kebijakan tersebut. Indikator karakteristik agen pelaksana mencakup kemampuan untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam setiap langkah implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terkait dengan indikator karakteristik agen pelaksana dapat dilihat sebagai berikut:

*"Biasanya sih kayak misalnya dalam melakukan sosialisasi itu selain dari lingkungan Pemprov bali itu, jadi biasanya kita mengundang instansi yang vertikal yang terkait, misalnya BPR, atau Kanwil, Kanwil Kumham, Kanwil Agama, yang kayak gitu mungkin kita undang-undang juga. Jadi kan tidak terbatas dari dinas-dinas di pemprov aja. Instansi vertikal kayak BPS, kita kan sering banget tuh butuh data dari BPS, kayak misalnya tu ada data capaiannya yang memang menilai bagaimana pelaksanaan PUG itu sendiri". (Ni Luh Ayu Cahya Saraswati, S.Pi., M.M. Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 12.05 WITA)*



Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan PUG meliputi instansi vertikal terkait seperti BPR, Kanwil Kemenkumham, dan Kanwil Agama. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga terlibat dalam penyediaan data yang diperlukan untuk menilai pelaksanaan PUG. Adapun hasil wawancara dengan informan ketua pengelola sebagai berikut:

*"Kalau begitu menyeimbangkan sekali kan agak sulit terkadang ibu rumah tangga kebanyakan dirumah jadi di dalam sebuah kegiatan baik itu aktivitas di dalam tugas itu kita libatkan semua ikut juga berpartisipasi juga, sehingga didalam hal ini kita berharap sekali si nantinya kedepan kesamaan gender itu tetep dipertahankan karena mungkin tanggung jawab sama begitu yang saya lakukan disini ya jadi persamaan gender selama ini masih sudah bagus sekali gitu dalam kegiatan gotong royong, bersih bersih". (Ketut Rinta, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 13.10)*

Informan menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam kegiatan gotong royong di Banyuwana *Waterfall*, dengan melibatkan semua pihak termasuk ibu rumah tangga dalam berbagai aktivitas, dan berharap agar prinsip kesetaraan gender terus dipertahankan kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perlunya menekankan prinsip kesetaraan gender, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh informan berikut:

*"Sering sekali, sudah tertata rapi perencanaan kita tiba-tiba di cut di tengah jalan sering sekali seperti itu sudah biasa itu dan kami selalu mengikhlaskan dan berusaha sendiri la jadinya bagaimana biar jalan tentang gender gitu, mungkin kedepannya dengan pemimpin yang baru ya dapat bupati baru kita lebih mudah masuk ke dalamnya untuk gendernya lebih maju di Buleleng". (Kadek Dami, S. E. DP2KBP3A, 13 Mei 2024, Pukul 09.40)*

Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan anggaran yang sering dipotong di tengah jalan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan untuk terus meyakinkan pihak terkait untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih optimal. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana kebijakan PUG saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan program. Hal ini tergambar dari adanya aktor lain seperti BPR, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Agama, serta BPS yang berperan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga berpedoman pada SOP dari KEMENPPPA dan KEMENDAGRI.

## **5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, penting untuk mempertimbangkan indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi kesuksesan implementasi. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan utama dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Terkait dengan hasil temuan wawancara dilapangan sesuai dengan indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

*"Kalau ekonomi sama pendapatan kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya. Karena seharusnya terkait dengan PUG ini dialokasikannya oleh desa. Tugas dari aparat memberikan akses kayak gitu. kan PUG ini apapun keterlibatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat tidak memandang pendapatannya itu dalam pembangunan itu kunci dari tercapainya PUG. Kan sekarang akses apapun itu udah gampang kan." (Ni Luh Ayu Cahya Saraswati, S.Psi., M.M., Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.05 WITA)*

Menurut informan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) seharusnya tidak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab aparat desa untuk memastikan akses yang mudah dan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara bersama informan Kepala BUMDes Wanagiri yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Karena kita melihat sekarang lingkungan menjadi tanggungjawab semua orang tidak hanya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan yang tinggal di hutan, mejadi tanggungjawab semua orang baik yang ada di kota dan sebagainya itu mempunyai tanggungjawab terhadap lingkungan supaya mereka bisa menyisihkan pendapatannya untuk membantu lingkungan, dan dana-dana itu bisa kita gunakan untuk pemeliharaan pohon-pohon itu dan juga pengembangan penanaman baru dan memberikan juga income terhadap masyarakat yang menjaga pohon itu secara langsung agar ada dampak sosial yang didapatkan itu yang kita harapkan”. (Made Darsana, Ketua BUMDES Eka Giri Karya Utama, 25 Mei 2024, Pukul 09.20)*

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Made Darsana bahwa antara ekonomi dan sosial memiliki keterkaitan satu sama lain dalam dalam berbagai pengelolaan objek wisata di desa wanagiri. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan bersama Pengelola Wanita yang merupakan pengelola objek wisata Banyuwana *Waterfall* juga menyatakan hal yang serupa.

*“Ekonomi dapet lah, kalau ada tamunya kan dapat uang. Secara ekonomi jelas pasti ya”. (Kadek Seniasih, 25 Mei 2024, Pukul 14.37)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan mengatakan bahwa dalam segi ekonomi memiliki keterkaitan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pelajar yang juga ikut menjadi pengelola objek wisata Banyuwana *Waterfall* memberikan tanggapan yang sama terkait dengan faktor ekonomi sebagai berikut:

*“Kayak dari ekonomi dapet kan gajinya gitu dapet uang semisal buat beli apa gitu perlengkapan sekolah atau pribadi gitu”. (Luh Kristina Dewi, Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 15.03 WITA)*

Luh Kristina Dewi juga menambahkan terkait dengan faktor sosial yang juga ikut serta memberikan kontribusi terhadap pengelolaan objek wisata Banyuwana *Waterfall*.

*“Gampang gampang susah, soalnya sudah di, orang tuanya dulu kan jadinya langsung di suruh kitanya untuk belajar juga karena sebagai pelajar gitu pengen interaksi sama tamu mengenal tamu kayak gimana”. (Luh Kristina Dewi, Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 15.03 WITA)*

Faktor sosial yang timbul juga tampak pada pengelola objek wisata banyuwana waterfall yang berprofesi sebagai ojek yang juga merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di objek wisata sebagai berikut:

*“Kalo manfaat sosial itudah ada rasa kekeluargaan lah sesama anggota kayak gitu, itudah. Dari dulunya jarang ketemu hampir gak pernahlah,kalo sekarang*

*hampir setiap hari kumpul-kumpul". (Gede Natih, Tukang Ojek, 25 Mei 2024, Pukul 15.19)*

Selain dampak sosial, dampak ekonomi juga terasa pada profesi pedagang yang berada di sekitar lingkungan Banyuwana *Waterfall*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*"Kalau musim rame sih paling banyak dapat 100 ribu ya kalau rame tamunya, kayak bulan juli, agustus gitu". (Luh Noviani, Pedagang 1, 26 Mei 2024, Pukul 15.19)*

Serupa dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Luh Noviani terkait dengan dampak ekonomi. Pedagang lainnya yang berada di sekitar objek wisata banyuwana waterfall juga memiliki kesinambungan dengan dampak ekonomi.

*"Sedikit ada pemasukan dan untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga sedikit ada dari segi keuangan, kalau itunya sangat sulit masih mengandalkan buruh, kalau dapat buruh ya baru dapat beras aja, tapi kalau jualan disini sedikit ada pemasukan". (Ketut Ardana, Pedagang 2, 26 Mei 2024, Pukul 13.09)*

Terdapat pula pedagang lainnya yang memberikan pernyataan yang sama mengenai dampak ekonomi yang memberi pengaruh terhadap kehidupannya.

*"Pendapatannya disana juga sedikit, kalau ngga ada yang belanja kan ga dapat apa-apa kosong juga dapat kosong orang ngga ada yang belanja. Disini kan netap biar ngga ada yang beli kan ga rugi, dulu kan ngga ada tempatnya disana balik lagi bawa pulang sekarang kan udah netap biar ga laku kan engga apa". (Komang Sunarini, Pedagang 3, 26 Mei 2024, Pukul 13.09)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyebutkan bahwasanya dampak ekonomi juga terasa dalam pengembangan objek wisata tersebut. Seiring dengan hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan berikut:

*"Di desa kan sudah ada permusyawaratan desa kadang yang perempuan justru enggan padahal sudah dibuka kesempatan 30 persen di BPD sudah ada keterwakilan perempuan, kadang yang perempuan sendiri kadang engga mau. Sudah didukung sama keluarga. Kita punya perbekel kan sudah ada perempuan yang di penampekan itu kan perempuan, kalau di panji cowok. Kita punya 5 perbekel perempuan di Kabupaten Buleleng". (Kadek Dami, SE, Senin, 13 Mei 2024, Pukul 09.40 WITA)*

Dari keseluruhan pembahasan indikator implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) menunjukkan bahwa meskipun terdapat standar dan sasaran kebijakan yang jelas, sumber daya yang terbatas dan komunikasi yang belum optimal menghambat efektivitasnya. Meskipun ada keterlibatan berbagai instansi vertikal dan komunitas lokal dalam pelaksanaan PUG, ketidak optimalan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan tantangan dalam menerapkan kebijakan secara menyeluruh. Sosialisasi yang belum memadai menyebabkan kurangnya pemahaman di tingkat masyarakat dan pengelola objek wisata. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak selalu mendukung juga mempengaruhi keberhasilan implementasi PUG, meskipun kebijakan ini seharusnya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut. Upaya yang lebih mendalam dan menyeluruh dalam sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan peran agen pelaksana diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di berbagai sektor.



(Wawancara Bersama Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Buleleng)



(Wawancara Bersama Ketua  
Pengelola Objek Wisata Banyuwana  
*Waterfall*)

Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yang mengidentifikasi adanya isu gender di beberapa destinasi wisata, terutama yang menjunjung tinggi nilai tradisional, di mana perempuan sering menghadapi kendala seperti kesenjangan gaji, pembatasan partisipasi politik, serta diskriminasi berbasis stereotip gender. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata dinilai dari sejauh mana mereka terberdayakan secara psikologis, politik, dan sosial (Khadijah, 2022). Hal ini menegaskan bahwa tantangan dalam implementasi PUG tidak hanya bersumber dari aspek kebijakan, tetapi juga dari akar permasalahan struktural yang membatasi perempuan dalam berpartisipasi secara setara di sektor pariwisata.

Indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Banyuwana *Waterfall* tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, melainkan oleh peran aparat desa dalam memastikan akses dan keterlibatan masyarakat. Meski kebijakan mendukung partisipasi perempuan, hambatan tetap ada karena kurangnya kemauan dari perempuan sendiri. Upaya sosialisasi dan dukungan berkelanjutan diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.

#### 4. CONCLUSION

Hasil riset yang dilaksanakan di Objek Wisata Banyuwana *Waterfall* menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender memiliki dampak positif pada keberlanjutan pariwisata yang adil dan inklusif. Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender belum optimal, berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan kurangnya pemahaman para implementor dari kelompok pengelola objek wisata dan masyarakat mengenai standar dan isi kebijakan. Selain itu, kondisi ekonomi, sosial, dan politik berkontribusi dalam menunjang implementasi PUG. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dalam pariwisata berbasis masyarakat belum tercapai secara optimal. Faktor utama yang memengaruhinya adalah adanya dominasi yang memicu bias gender dalam proses pembangunan pariwisata (Putra, 2024). Adapun saran yang dapat diberikan yaitu; perlunya peningkatan pemahaman standar dan sasaran kebijakan perlu dilakukan melalui sosialisasi dan pelaksanaan program edukasi mengenai PUG, sehingga baik Lembaga pemerintahan, Lembaga non-pemerintahan, maupun kelompok masyarakat dapat memahami dengan



baik isi, tujuan, dan sasaran kebijakan; perlu adanya pembagian tugas dan Kerjasama antar Lembaga pemerintahan dengan driver kebijakan dalam implementasi kebijakan PUG; perlunya peningkatan intensitas komunikasi antara Lembaga pemerintah dengan penggerak kebijakan seperti pemerintah daerah, pejabat publik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta organisasi gender atau perempuan, dan kelompok masyarakat mengenai kebijakan PUG, sehingga dapat menjangkau seluruh bidang lini; perlu adanya penyelarasan program kerja dan kegiatan dalam implementasi kebijakan PUG baik pada Lembaga pemerintah di tingkat provinsi dan daerah maupun Lembaga non pemerintahan; perlunya integrasi poin responsive gender perlu dituangkan dan rencana Pembangunan dan pengelolaan pariwisata; dalam pelaksanaan program PUG, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran responsive gender pada setiap program yang telah direncanakan.

## 5. ACKNOWLEDGE

Disampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulisan dan pelaksanaan Riset Sosial Humaniora dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pendanaan tahun 2024. Pertama, disampaikan terima kasih yang kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) atas kesempatan dan dukungan materiil yang diberikan dalam menyelesaikan riset ini. Kedua, disampaikan terima kasih kepada Universitas Warmadewa atas fasilitas dan dukungan yang telah diberikan selama proses riset ini berlangsung. Ketiga, terima kasih disampaikan kepada seluruh informan pada riset ini diantaranya: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng; Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng atas waktu dan atensinya selama proses pengumpulan data berlangsung. Keempat, disampaikan juga terima kasih kepada pengelola objek wisata Banyuwana *Waterfall* yang telah memberikan akses dan informasi penting yang sangat berguna bagi riset ini. Terakhir, ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, Kakak I Putu Adi Permana Putra, S.AP., M.AP, atas bimbingan, saran, dan dukungannya yang tak ternilai sepanjang penelitian ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses.

## 6. REFERENCES

- Ayissa Tazkia, A. T., Listyaningsih, & Juliannes Cadith. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25–44. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>
- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 160. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.10699>
- Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., Nurfikriyah Irhashih Ilyas, S.Pd., M. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Hapsari, V. R., & Usman, U. (2022). Peran Perempuan Dalam Mendukung Perekonomian Keluarga Pada Kegiatan Pariwisata Di Daerah Perbatasan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 279–284. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1837>
- Khadijah, S. A. R. (2022). Pemberdayaan Dan Keterlibatan Perempuan Dalam

- Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Warta Pariwisata*, 20(1), 18–21.  
<https://doi.org/10.5614/wpar.2022.20.1.05>
- Nurti, Y., Indrizal, E., & Irwandi, A. (2023). Transformasi Gender pada Pembangunan Pariwisata berbasis Masyarakat di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 508–517.
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2021. (n.d.).
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164–171.  
<https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>
- Puspitosari, H., & Maharani, A. E. P. (2014). Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan. *Ratu Adil*, 3(1), 1–19.
- Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 81–91.  
<https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445>
- Putra, I. P. A. P. (2024). *Women equity in tourism : Analysis of gender equality in Tukad Bindu tourism objects*. 5(1), 41–55. <https://doi.org/10.32505/anifa.v5i1.8269>
- putuekajalanjalan.com. (2018). *Air Terjun Banyu Wana Amertha Keindahannya Mulai Terkuak ke Dunia*. <https://putuekajalanjalan.com/air-terjun-banyu-wana-amertha-keindahannya-terkuak-dunia/>
- Subekti, A. I. (2009). Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk 1. *Peran Perempuan Dalam Pariwisata*, 2(1), 1–118.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta, cv.
- Wilson, T. D., & Ypeij, A. (2012). Tourism, gender, and ethnicity. *Latin American Perspectives*, 39(6), 5–16. <https://doi.org/10.1177/0094582X12453896>
- Wongkar, B. C., Liando, D. M., & Kawung, E. J. R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86), 70–81.